



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS
3,99 / 99,86%

Jumlah	175 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 155 PEREMPUAN : 20
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 SMP : 0 SMU : 3 Diploma 1 : 0
Pekerjaan	PNS : 3 TNI : 0 POLRI : 0 LAINNYA : 87
	Diploma 3 : 2 S1 : 138 S2 : 29 S3 : 3 SWASTA : 65 WIRUSAHA : 20 TENAGA KONTRAK : 0

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,983
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,983
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBSP)	3,983

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. TINDAK LANJUT ATAS TIGA NILAI TERENDAH

HASIL EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPA)
TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Hasil Survei 3 Unsur Terendah	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut	Data Dukung
1.	Selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan	1. Publikasi jenis layanan dan biaya layanan melalui media informasi diantaranya website, media sosial, Pamflet ataupun brosur 2. Diberikan pemahaman dan penjelasan oleh petugas PTSP terhadap informasi tarif/biaya dan layanan kepada penerima layanan	Memasang pamflet/brosur di meja layanan dan tayangan slide pada layar informasi maupun pada website dan media sosial pada Pengadilan Tinggi Bandung	1. Standar pelayanan 2. Pembinaan Petugas PTSP 3. Aplikasi Media Sosial
2.	Di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.	1. Publikasi produk dan biaya layanan (bila ada) melalui media (website/IG Humas/Pamflet/brosur) 2. Sosialisasi kepada masyarakat pengguna layanan terhadap jenis pelayanan yang ada dan bisa diperoleh di Pengadilan Tinggi Bandung beserta besaran biaya/tarif layanan serta publikasi jenis dan biaya layanan pada layar informasi, website dan media sosial.	Memasang pamflet/brosur di meja layanan dan tayangan slide pada layar informasi maupun pada website dan media sosial pada Pengadilan Tinggi Bandung	1. Standar pelayanan 2. Aplikasi Media Sosial
3.	Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBSP)	1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap jenis pelayanan yang ada dan bisa diperoleh di Pengadilan Tinggi Bandung beserta besaran biaya/tarif layanan serta publikasi jenis dan biaya layanan pada layar informasi dan media sosial. 2. Dimintakan bukti pembayaran PNBSP yang disetor kepada Negara dari bagian Keuangan	1. Memasang pamflet/brosur di meja layanan dan tayangan slide pada layar informasi maupun pada website dan media sosial pada Pengadilan Tinggi Bandung 2. Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait penyetoran biaya PNBSP	1. Standar pelayanan 2. Maklumat Pelayanan 3. Aplikasi Media Sosial 4. Bukti Setor PNBSP

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

7 April 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum.